

Dinamika Collaborative Governance pada Destinasi Berbasis Komunitas : Studi Kasus Kawasan Dermaga Kereng Bangkirai

Enjelic Cepianty Danubarti^{1*}, Alicia Dhela Setiani¹, Stevani Esterlin¹

¹Universitas Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia

<p>ABSTRACT</p> <p>Current tourism development emphasizes a collaborative governance approach as an effort to realize sustainable and community-based destination management. The Kereng Bangkirai Pier area is a local destination in Central Kalimantan that has developed through collaboration involving the Tourism Office, local communities, the Tourism Awareness Group (Pokdarwis), and tourism businesses. This study aims to analyze the dynamics of collaborative governance in community-based tourism destination management in the Kereng Bangkirai area. This study uses a qualitative approach through data collection techniques using literature study and documentation methods through direct observation at tourist sites. The results show that collaborative governance is formed through interactions between actors. However, in practice, it still faces challenges in the form of suboptimal coordination and uneven community participation. This study emphasizes the importance of strengthening collaboration mechanisms to support the sustainability of tourism management in the Kereng Bangkirai Pier area.</p>	<p style="text-align: right;">CONTACT ecd.enjelic@gmail.com</p> <p style="text-align: right;">KEYWORDS Collaborative Governance, Dynamics, governance, sustainable tourism, Kereng Bangkirai</p> <p style="text-align: right;">Received: 10/03/2026 Revised: 11/03/2026 Accepted: 28/04/2026 Online: 30/04/2026 Published: 30/04/2026</p> <p>Al-ijtima'i is licenced under a Creative Commons Attribution Share-Alike Public Licence (CC-BY-SA)</p>
<p>ABSTRAK</p> <p>Pengembangan pariwisata saat ini menekankan pendekatan <i>collaborative governance</i> sebagai upaya mewujudkan pengelolaan destinasi yang berkelanjutan dan berbasis komunitas. Kawasan Dermaga Kereng Bangkirai merupakan destinasi lokal di Kalimantan Tengah yang berkembang melalui kolaborasi yang melibatkan Dinas Pariwisata, masyarakat lokal, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), serta pelaku usaha wisata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika <i>collaborative governance</i> dalam pengelolaan destinasi wisata berbasis komunitas di kawasan Kereng Bangkirai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui teknik pengumpulan data dengan metode studi literatur dan dokumentasi melalui observasi langsung di lokasi wisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>collaborative governance</i> terbentuk melalui interaksi antara aktor. Namun, dalam pelaksanaannya masih menghadapi tantangan berupa koordinasi yang belum optimal, serta partisipasi masyarakat yang belum merata. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan mekanisme kolaborasi untuk mendukung keberlanjutan pengelolaan pariwisata di Kawasan Dermaga Kereng Bangkirai.</p>	

INTRODUCTION

Pariwisata berkelanjutan menjadi paradigma utama dalam pembangunan destinasi khususnya wisata, karena secara konseptual pembangunan pariwisata tidak hanya dipahami sebagai aktivitas

ekonomi, melainkan sebagai proses multidimensional yang menyentuh aspek sosial, budaya dan lingkungan (Rahayu & Saragih, 2022).

Pendekatan ini menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan identitas sosial dan budaya lokal dalam praktik kepariwisataan, yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian sumber daya alam dan memberikan dampak sosial positif bagi komunitas lokal. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan mampu memperkuat pemberdayaan masyarakat lokal, mendukung konservasi sumber daya alam, serta menciptakan nilai tambah ekonomi tanpa mengorbankan integritas ekologis destinasi wisata (Saputra, 2024). Dengan demikian, pariwisata berkelanjutan dipahami sebagai upaya menjaga harmoni antara aktivitas wisata, daya dukung lingkungan, dan kepentingan masyarakat setempat.

Dalam beberapa tahun terakhir, sektor pariwisata di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan dan semakin diposisikan sebagai instrumen strategis dalam pembangunan daerah. Transformasi ini tidak hanya tercermin pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dan tempat-tempat unggulan saja, tetapi juga pada bertambahnya ragam destinasi yang dikembangkan berbasis potensi lokal yang melibatkan komunitas setempat dalam proses pengelolaannya (Priatmoko et al., 2025). Perubahan ini menunjukkan pergeseran kebijakan dari pembangunan yang terpusat pada destinasi unggulan menuju penguatan potensi wilayah secara lebih merata. Pengembangan destinasi kini diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus memperluas peran masyarakat dalam pengelolaan wisata.

Sejalan dengan pergeseran tersebut, pendekatan Community-Based Tourism (CBT) semakin banyak digunakan sebagai kerangka dalam pengembangan destinasi berbasis masyarakat. CBT menempatkan komunitas lokal sebagai aktor utama dalam proses perencanaan, pengelolaan, hingga pengambilan keputusan terkait kegiatan pariwisata (Nainggolan et al., 2024). Melalui pendekatan ini, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat pasif dari dampak pembangunan, melainkan memiliki posisi strategis dalam menentukan arah pengembangan destinasi serta distribusi manfaat ekonomi, sosial, dan budaya yang dihasilkan (Maulana et al., 2024). Meskipun pendekatan CBT memberikan kerangka yang kuat untuk memberdayakan masyarakat, partisipasi dalam pengembangan dan keberlanjutan wisata tidak selalu berjalan secara ideal.

Keterlibatan masyarakat seringkali dipengaruhi oleh faktor kapasitas sumber daya manusia, kepemimpinan lokal, distribusi peran, serta dinamika internal kelompok pengelola. Penelitian yang dipublikasikan dalam *Journal of Tourism Sustainability* menunjukkan bahwa hambatan seperti gaya kepemimpinan yang cenderung *top-down*, tata kelola yang kurang transparan, serta konflik internal

dalam kelompok pengelola dapat membatasi tingkat partisipasi masyarakat dan berdampak pada keberlanjutan program CBT (Rahman et al., 2024).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan destinasi berbasis masyarakat tidak hanya ditentukan oleh keterlibatan komunitas semata, tetapi juga oleh pola interaksi dan kolaborasi antar aktor yang terlibat dalam sistem tata kelola pariwisata. Keterbatasan tersebut mengindikasikan bahwa pengelolaan destinasi wisata memerlukan pendekatan tata kelola yang lebih partisipatif dan kolaboratif.

Dalam konteks ini, paradigma *collaborative governance* menjadi relevan sebagai model pengelolaan yang menekankan keterlibatan multipihak dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan publik. Secara teoritis, penelitian ini menggunakan kerangka *Collaborative Governance Regimes* (CGR) yang dikembangkan oleh Kirk Emerson dan Tina Nabatchi (Emerson & Nabatchi, 2015b). Kerangka CGR menjelaskan bahwa kolaborasi dipengaruhi oleh dinamika inti yang meliputi: (1) *principled engagement* (proses dialog, penentuan kepentingan bersama, dan deliberasi), (2) *shared motivation* (kepercayaan, komitmen, dan legitimate bersama), serta (3) *capacity for joint action* (sumber daya, kepemimpinan, dan struktur kelembagaan). Ketiga indikator tersebut menjadi dasar analisis dalam melihat bagaimana kolaborasi terbentuk dan dijalankan dalam tata kelola destinasi wisata (Emerson & Gerlak, 2014; Emerson & Nabatchi, 2015).

Kawasan Wisata Dermaga Kereng Bangkirai di Kota Palangka Raya merupakan salah satu ikon pariwisata unggulan di Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Destinasi ini dikenal sebagai pintu gerbang menuju kawasan hutan rawa gambut dan Sungai Sebangau yang memiliki nilai ekologis sekaligus daya tarik wisata alam yang khas. Keberadaan dermaga kayu yang membentang di atas perairan gambut, aktivitas susur sungai, serta pemandangan matahari terbenam menjadikan kawasan ini tidak hanya sebagai ruang rekreasi, tetapi juga sebagai representasi identitas wisata alam Kota Palangka Raya.

Secara strategis, kawasan ini berfungsi sebagai titik pertemuan antara potensi ekowisata, pemberdayaan masyarakat setempat, dan kebijakan pengembangan pariwisata daerah. Sebagai destinasi berbasis komunitas, pengelolaan kawasan ini melibatkan Dinas Pariwisata, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), masyarakat lokal, serta pelaku usaha. Implementasi prinsip Sapta Pesona sebagai pedoman bagi masyarakat dan pengelola wisata agar destinasi wisata memiliki kualitas serta daya tarik yang baik dan menjadi landasan normatif dalam menjaga aspek keamanan, ketertiban, kebersihan, kesejukan, keindahan, keramahan dan kenangan bagi pengunjung.

Namun demikian, praktik kolaborasi dalam pengelolaan destinasi berbasis komunitas tidak selalu berjalan secara ideal. Perbedaan kepentingan antar aktor, keterbatasan kemampuan

organisasi serta dinamika komunikasi seringkali mempengaruhi efektivitas tata kelola yang dibangun.

Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan destinasi tidak hanya ditentukan oleh potensi sumber daya, tetapi juga oleh kualitas interaksi dan kerja sama antar pemangku kepentingan. Penelitian ini menawarkan kebaruan ilmiah melalui penggunaan kerangka Collaborative Governance Regimes (CGR) untuk menganalisis tata kelola destinasi berbasis komunitas pada Kawasan Wisata Dermaga Kereng Bangkirai. Kebaruan penelitian ini terlihat pada konseptual yang digunakan, dimana dalam kajian sebelumnya meneliti tentang bagaimana pengelolaan destinasi berbasis masyarakat lebih banyak menekankan pada pendekatan *Community-Based Tourism* (CBT) yang berfokus pada partisipasi dan pemberdayaan komunitas secara normatif (Ali et al., 2025; Berhanu Melese et al., 2026; DURRAH et al., 2026; Nguyen & Nguyen, 2026; Sadykov et al., 2026; Suriyankietkaew et al., 2025), namun belum banyak mengkaji secara mendalam dinamika kolaborasi multipihak yang mempengaruhi keberlanjutan tata kelola destinasi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika *collaborative governance* dalam tata kelola destinasi berbasis komunitas di Kawasan Wisata Dermaga Kereng Bangkirai. Dengan menggunakan kerangka CGR sebagai dasar analisis. Kajian ini diarahkan untuk memahami bagaimana tata kelola destinasi wisata dijalankan melalui keterlibatan berbagai aktor khususnya Dinas Pariwisata, Pokdarwis, masyarakat, dan pelaku usaha, serta bagaimana peran masing-masing aktor tersebut terbentuk dalam proses kolaborasi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi dinamika interaksi dan berbagai tantangan yang mempengaruhi efektivitas tata kelola destinasi dalam implementasi prinsip *Sapta Pesona*.

METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Charmaz, 2006; Sarah J. Tracy, 2013) sebagai landasan metodologis dalam memahami dan menganalisis dinamika *collaborative governance* pada pengelolaan destinasi wisata berbasis komunitas di Kawasan Dermaga Kereng Bangkirai, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan penelitian ini tidak diarahkan untuk mengukur variabel secara statistik, melainkan untuk memahami secara mendalam pola interaksi, dinamika peran aktor, serta tantangan tata kelola yang bersifat kontekstual dan tidak dapat direduksi ke dalam angka (Creswell, 2014). Pendekatan ini dinilai paling sesuai untuk mengkaji fenomena sosial yang kompleks seperti *collaborative governance*, di mana makna, proses, dan relasi antar aktor menjadi fokus analisis utama.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua metode yang saling melengkapi. Pertama, studi literatur yang digunakan untuk membangun landasan teoretis dan konseptual penelitian, terutama dalam mengoperasionalkan kerangka Collaborative

Governance Regimes (CGR) yang dikembangkan oleh (Emerson & Gerlak, 2014; Emerson & Nabatchi, 2015a) sebagai alat analisis utama.

Kajian literatur mencakup dokumen kebijakan, peraturan perundang-undangan, penelitian terdahulu, serta laporan resmi yang berkaitan dengan pengelolaan pariwisata berbasis komunitas dan implementasi prinsip Sapta Pesona. Kedua, dokumentasi melalui observasi langsung di lokasi wisata yang dilakukan untuk memperoleh data empiris mengenai kondisi aktual pengelolaan kawasan, pola keterlibatan aktor, aktivitas ekonomi masyarakat, serta penerapan prinsip Sapta Pesona di lapangan. Observasi dilaksanakan secara non-partisipan dengan mengamati secara sistematis aktivitas pengelolaan, interaksi antar pemangku kepentingan, dan kondisi fisik kawasan wisata, guna mendapatkan gambaran yang utuh tentang dinamika tata kelola yang berlangsung.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan Miles & Huberman dalam (Mukarromah et al., 2025; Wilhelmina & Mistriani, 2025) yang mencakup tiga tahap yang berjalan secara simultan dan berkesinambungan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, seluruh informasi yang diperoleh dari studi literatur dan observasi lapangan disaring dan difokuskan pada aspek-aspek yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Tahap penyajian data dilakukan dengan menyusun temuan secara terstruktur berdasarkan tiga indikator utama kerangka CGR, yakni *principled engagement*, *shared motivation*, dan *capacity for joint action*, untuk memudahkan proses interpretasi. Tahap penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif dengan mengidentifikasi pola-pola yang muncul dari data, kemudian dikonfirmasi kembali melalui referensi teoretis yang relevan guna menjaga keabsahan analisis.

Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan mengkonfirmasi temuan dari observasi lapangan dengan data dokumentasi dan literatur yang ada, sehingga simpulan yang dihasilkan memiliki dasar empiris yang memadai (Fikri et al., 2025; Hasanah & Surya, 2025). Kerangka CGR kemudian digunakan secara konsisten sebagai pisau analisis untuk menginterpretasikan dinamika kolaborasi yang ditemukan, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta merumuskan rekomendasi penguatan mekanisme tata kelola destinasi wisata di Kawasan Dermaga Kereng Bangkirai.

RESULTS

A. Tata Kelola Destinasi Kawasan Wisata Dermaga Kereng Bangkirai

Tata kelola destinasi wisata merupakan aspek penting dalam memastikan keberlanjutan pengelolaan kawasan wisata, terutama pada destinasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, masyarakat, dan sektor pendukung lainnya. Dalam konteks pariwisata berbasis masyarakat, tata kelola tidak hanya berkaitan dengan pengaturan kelembagaan

dan kebijakan, tetapi juga mencakup bagaimana koordinasi, partisipasi, serta pembagian peran antar aktor dalam mengelola dan mengembangkan destinasi wisata (Wahyudin et al., 2024).

Pola interaksi antar aktor tersebut akan mempengaruhi efektivitas pengelolaan destinasi serta keberlanjutan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang dihasilkan dari aktivitas pariwisata. Pada Kawasan Wisata Dermaga Kereng Bangkirai di Kota Palangka Raya, tata kelola destinasi menunjukkan adanya dinamika yang berkembang seiring dengan keterlibatan berbagai aktor dalam pengelolaan kawasan wisata, baik pemerintah daerah maupun masyarakat lokal. Dalam praktiknya, pengelolaan wisata ini masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama pada aspek kelembagaan, koordinasi antar aktor, serta mekanisme pengelolaan yang belum sepenuhnya terstruktur. Kondisi ini menunjukkan bahwa tata kelola destinasi wisata Kereng Bangkirai masih berada dalam proses penataan dan penguatan.

a. Kelembagaan Pengelolaan Wisata

Kelembagaan pengelolaan Kawasan Wisata Dermaga Kereng Bangkirai saat ini masih berada dalam tahap penataan. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang sebelumnya berperan dalam pengelolaan destinasi diketahui sempat dibekukan sehingga hingga saat ini belum memiliki Surat Keputusan (SK) resmi sebagai dasar legalitas organisasi. Pokdarwis sendiri merupakan kelompok masyarakat yang dibentuk untuk mendukung pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata di tingkat lokal (Rahim, 2012). Kondisi tersebut menyebabkan struktur kelembagaan pengelola wisata belum dapat berfungsi secara optimal. Dalam situasi tersebut, pengelolaan aktivitas wisata sementara masih dijalankan oleh masyarakat setempat yang terlibat langsung dalam berbagai kegiatan wisata. Sementara itu, pada area dermaga yang berfungsi sebagai akses transportasi sungai, pengawasan berada di bawah kewenangan Dinas Perhubungan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan kawasan wisata masih terbagi antara pengawasan pemerintah dan partisipasi masyarakat lokal.

b. Keterlibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Wisata

Masyarakat lokal memiliki peran yang cukup penting dalam menjalankan aktivitas wisata di Kawasan Wisata Dermaga Kereng Bangkirai. Keterlibatan masyarakat terlihat dari pengelolaan berbagai layanan wisata yang secara langsung dijalankan oleh warga di sekitar kawasan tersebut. Namun demikian, mekanisme keterlibatan masyarakat dalam struktur pengelolaan belum sepenuhnya bersifat partisipatif. Dalam beberapa kasus, perwakilan masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan destinasi dipilih secara langsung oleh pihak dinas terkait. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih berjalan secara terbatas dan belum sepenuhnya berbasis pada mekanisme organisasi yang terbuka dan terstruktur. Meskipun demikian, masyarakat tetap menjadi aktor utama yang menjalankan aktivitas wisata sehari-hari

c. Pemanfaatan Ekonomi dan Sistem Pengelolaan Aktivitas Wisata

Kawasan Wisata Dermaga Kereng Bangkirai juga menunjukkan adanya aktivitas ekonomi lokal yang berkembang melalui keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan usaha wisata. Salah satu bentuk aktivitas ekonomi yang terlihat adalah keberadaan pelaku usaha mikro seperti kantin dan penyewa stand yang beroperasi di sekitar kawasan dermaga. Berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan, penyewaan stand bagi pelaku usaha dikenakan biaya sekitar Rp400.000 per bulan atau sekitar Rp.6.000.000,- per tahun. Meskipun jumlah pengunjung cenderung meningkat pada akhir pekan maupun hari libur, beberapa pelaku usaha menyampaikan bahwa kegiatan usaha di kawasan wisata ini masih dapat memberikan keuntungan bagi mereka.

Aktivitas ekonomi masyarakat juga terlihat melalui keberadaan kelompok penyedia jasa wisata air yang beroperasi di kawasan dermaga. Kelompok ini menyediakan layanan transportasi wisata menggunakan perahu tradisional seperti jukung, ketotok, wahana sepeda air berbentuk bebek, maupun perahu bermotor yang dapat digunakan pengunjung untuk berkeliling di sekitar kawasan dermaga dan untuk kegiatan susur sungai.

Wisata susur sungai ini menjadi salah satu daya tarik bagi pengunjung karena memungkinkan wisatawan menikmati karakteristik sungai air hitam yang menjadi ciri khas kawasan Kereng Bangkirai serta mengunjungi beberapa titik wisata di sekitar kawasan, seperti area Batu Ampar dan kawasan hutan rawa gambut di sekitar Sungai Sebangau yang masih memiliki kondisi alam relatif alami dan menjadi bagian dari ekosistem Taman Nasional Sebangau. Aktivitas ini umumnya dikelola secara langsung oleh masyarakat lokal yang tergabung dalam kelompok pengemudi perahu, yang sekaligus berperan sebagai pemandu bagi wisatawan selama melakukan perjalanan susur sungai.

Seiring dengan aktivitas usaha kuliner, layanan penyedia jasa wisata dan perdagangan kecil, dinamika pengelolaan ekonomi wisata juga berkaitan dengan sistem distribusi keuntungan dari pengelolaan kawasan wisata. Pada periode sebelumnya, pembagian keuntungan dari aktivitas wisata sempat dilakukan dengan skema tertentu antara kelompok pengelola wisata dan pemerintah daerah. Namun dalam perkembangan terakhir, pengelolaan pendapatan dari aktivitas wisata lebih banyak berada di bawah kewenangan pemerintah daerah, khususnya melalui Dinas Pariwisata.

Dalam dua tahun terakhir, kawasan wisata ini juga mulai menerapkan sistem karcis atau tiket masuk bagi pengunjung dengan tarif sebesar Rp5.000, per orang, baik pada hari biasa maupun akhir pekan. Sebelumnya, kawasan wisata ini tidak memberlakukan sistem tiket masuk sehingga pengunjung dapat mengakses kawasan wisata secara bebas. Meskipun demikian, penerapan tiket masuk tidak menjadi permasalahan utama dalam pengelolaan kawasan wisata.

Tiket tersebut diberlakukan sebagai tiket masuk bagi pengunjung secara umum, sebagaimana yang diterapkan pada kawasan wisata pada umumnya. Hasil dari penjualan karcis tersebut kemudian dimanfaatkan untuk mendukung pengelolaan kawasan wisata serta kepentingan pengembangan destinasi secara bersama.

Selain itu, terdapat pula pembagian kewenangan pengelolaan kawasan yang melibatkan beberapa instansi pemerintah. Area dermaga yang berfungsi sebagai akses transportasi air berada di bawah pengelolaan Dinas Perhubungan, sementara pengembangan wisata secara umum berkaitan dengan peran Dinas Pariwisata. Dalam pengelolaan kawasan wisata ini juga terdapat sejumlah rencana pengembangan fasilitas yang diharapkan dapat menunjang aktivitas wisata, meskipun beberapa fasilitas tersebut hingga saat ini belum sepenuhnya terealisasi.

Dalam praktiknya, kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di Kawasan Wisata Dermaga Kereng Bangkirai telah memberikan peluang usaha bagi masyarakat lokal. Namun demikian, dalam hal pengelolaannya masih diperlukan penataan sistem pengelolaan yang lebih jelas agar memberikan manfaat yang lebih optimal.

d. Dukungan Program dan Koordinasi Pengelolaan Kawasan Wisata

Pengembangan Kawasan Wisata Dermaga Kereng Bangkirai juga memperoleh dukungan dari berbagai pihak, termasuk bantuan dari Bank Indonesia melalui Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) yang ditujukan untuk mendukung pengembangan destinasi wisata lokal di Kota Palangka Raya. dalam upaya pengembangan Kawasan Wisata Dermaga Kereng Bangkirai sebagai salah satu destinasi wisata unggulan daerah.

Selain dukungan dari lembaga eksternal, pengelolaan kawasan wisata ini juga melibatkan koordinasi dengan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Palangka Raya serta rencana pembentukan kembali Pokdarwis sebagai lembaga pengelola destinasi di masa mendatang. Dalam proses perencanaan pembangunan daerah, pengembangan Kawasan Wisata Dermaga Kereng Bangkirai juga dimasukkan dalam agenda perencanaan pemerintah daerah melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kelurahan yang melibatkan berbagai perangkat daerah serta unsur masyarakat dalam menyusun usulan program pembangunan daerah.

Keterlibatan berbagai pihak tersebut menunjukkan bahwa Kawasan Wisata Dermaga Kereng Bangkirai tetap menjadi bagian dari perhatian pemerintah daerah dalam pengembangan sektor pariwisata. Namun demikian, dalam praktik pengelolaannya masih diperlukan penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan serta penataan kelembagaan pengelola destinasi agar pengembangan kawasan wisata dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

B. Peran Dinas Pariwisata, Pokdarwis, Masyarakat dan Pelaku Usaha

Collaborative governance melibatkan beberapa sektor untuk terlaksananya pariwisata yang berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, pihak-pihak yang terkait memiliki peran masing-masing. Peranan merupakan aspek dinamis dari hubungan antara manusia dalam kedudukan di masyarakat (Laksmindari & Priskilla, 2024). Tata kelola pariwisata menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan dan keberlanjutan sebuah destinasi wisata dipengaruhi oleh kolaborasi beberapa aktor pemangku kepentingan (Mulyani et al., 2021). Hal ini relevan pada destinasi berbasis ekowisata di Dermaga Kereng Bangkirai.

Dengan terlaksananya *collaborative governance* mendukung keberlanjutan di wisata Dermaga Kereng Bangkirai yang sejalan dengan regulasi Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, 2009), yang menegaskan pembangunan pariwisata harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga kelestarian alam dan budaya, memberdayakan masyarakat lokal, serta menjamin keberlanjutan lingkungan destinasi.

Kebijakan inilah yang memperkuat konsep pembangunan pariwisata berbasis masyarakat lokal sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek wisata. Oleh sebab itu, terdapat beberapa aktor yang memegang peran strategis, diantaranya dinas pariwisata, kelompok sadar wisata (Pokdarwis), masyarakat lokal, dan pelaku usaha.

a. Peran Dinas Pariwisata

Dinas Pariwisata merupakan lembaga pemerintah yang menjadi koordinator, menyusun regulasi serta rencana pembangunan, dan tetap memperhatikan aspek sosial. Peran ini tidak hanya terbatas dalam penyusunan kebijakan, tetapi juga memastikan stakeholder memiliki ruang yang setara (Marzaniar & Subarsono, 2023). Dalam pelaksanaannya, dinas pariwisata diberikan kewenangan untuk mengelola destinasi wisata sesuai daerahnya masing-masing. Wisata Kereng Bangkirai berada di bawah naungan dan pengelolaan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (Disparbudpora) Kota Palangka Raya. Dinas inilah yang kemudian bertanggung jawab untuk mengembangkan pariwisata di kota tersebut.

Dinas Pariwisata memiliki peran sebagai motivator dalam pengembangan pariwisata agar usaha terus berjalan. Dalam pengelolaan pariwisata, Dinas Pariwisata sebagai lembaga pemerintah mendorong masyarakat mengelola pariwisata dengan program yang berfokus pada kawasan pusat edukasi lingkungan dan destinasi unggul berkelanjutan. Program tersebut diantaranya, peningkatan infrastruktur dan fasilitas, dengan membangun fasilitas pendukung seperti panggung pentas, musala, area parkir, spot foto, kamar mandi, pengembangan wisata susur sungai agar wisatawan dapat mengeksplor air hitam di area Dermaga Kereng Bangkirai.

Disisi lain juga program ini memberikan wisatawan pengalaman untuk mengunjungi beberapa area seperti area Batu Ampar menggunakan jalur air serta memberikan pembinaan dan pelatihan kepada Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) agar masyarakat dapat mandiri dalam mengelola objek wisata.

b. Peran Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata)

Pokdarwis merupakan organisasi masyarakat yang berperan langsung dalam pengelolaan destinasi wisata di tingkat lokal. Keberadaan Pokdarwis cukup penting di sebuah destinasi wisata. Hal tersebut dikarenakan mereka memiliki pemahaman yang lebih mendalam yang lebih mendalam mengenai kondisi sosial lingkungan di kawasan wisata. Dalam mengembangkan pariwisata terdapat beberapa peranan pokdarwis (Salsabila & Puspitasari, 2023) diantaranya, sebagai pihak yang terlibat dalam perencanaan (*idea planning stage*), strategi kepanitiaan maupun anggaran suatu perencanaan. Pokdarwis juga berperan sebagai pelaksana (*implementation stage*), Pokdarwis memberikan keterlibatan serta kontribusi tenaga, maupun material berupa uang maupun barang dalam tahap pelaksanaan maupun perencanaan. Selain itu, Pokdarwis ikut terlibat dalam pemanfaatan proyek yang sudah diselesaikan. Salah satunya dengan berkontribusi dalam pemeliharaan sebuah proyek yang sudah dibuat. Dengan adanya kelompok masyarakat seperti Pokdarwis dapat memperkuat tata kelola destinasi wisata karena mereka memiliki kedekatan sosial dengan masyarakat serta memahami kondisi lokal secara lebih baik.

Di Kawasan Wisata Dermaga Kereng Bangkirai, Pokdarwis memiliki keterlibatan dalam kegiatan pengelolaan wisata seperti pengelolaan fasilitas wisata, menjaga kebersihan kawasan wisata, serta jembatan antara pemerintah dan masyarakat yang mengelola ataupun yang berada langsung di kawasan wisata. Pemerintah dan pokdarwis menjadi sebuah kolaborasi yang cukup penting dalam memperkuat kelembagaan lokal serta pengembangan pariwisata berkelanjutan.

c. Peran Masyarakat Lokal

Masyarakat lokal memiliki peran yang penting dalam pengembangan pariwisata. Dalam pengembangan pariwisata masyarakat bukan hanya sekadar objek pembangunan, namun berperan aktif dalam pengelolaan destinasi wisata. Partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan. Dengan adanya keterlibatan masyarakat dapat membantu meningkatkan pendapatan ekonomi di masyarakat lokal.

Pada Kawasan Wisata Dermaga Kereng Bangkirai, masyarakat berperan aktif dalam aktivitas ekonomi serta pengembangan wisata di daerah tersebut. Masyarakat lokal memberikan penyediaan jasa transportasi air untuk meningkatkan pengalaman wisata, masyarakat lokal memberikan sebutan wisata ini dengan nama "Wisata Susur Sungai." dengan beberapa rute yang berbeda dari yang terdekat hingga yang terjauh.

Selain itu terdapat UMKM yang dikelola langsung oleh masyarakat lokal seperti oleh-oleh, makanan khas daerah. Dengan adanya keterlibatan langsung oleh masyarakat inilah mampu meningkatkan pariwisata berkelanjutan serta berperan aktif dalam pengelolaan destinasi wisata.

d. Peran Pelaku Usaha

Pelaku usaha terlibat dalam penyediaan layanan pariwisata dengan menyediakan layanan usaha seperti kuliner, transportasi wisata, akses parkir. Dengan adanya keberadaan pelaku wisata ini dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan wisata sekaligus di kawasan destinasi wisata. Selain itu, pelaku usaha dapat mendorong inovasi pengembangan produk wisata yang lebih menarik bagi wisatawan.

Dalam penelitian (Siok, 2025) menunjukkan bahwa keterlibatan sektor swasta dalam *collaborative governance* mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan destinasi wisata dengan dikarenakan sektor pariwisata mempunyai kapasitas dalam mengembangkan produk wisata serta kemampuan memanfaatkan peluang pasar.

C. Dinamika dan Tantangan Tata Kelola Destinasi Wisata

Dalam *Collaborative Governance*, tata kelola destinasi wisata tidak lagi bersifat hierarkis melainkan dengan keterlibatan interaksi yang cukup kompleks bagi masyarakat maupun pemerintah daerah. Pada Kawasan Wisata Dermaga Kereng Bangkirai ini terungkap adanya dinamika dan tantangan yang dapat dilihat dari kesenjangan antara potensi sumber daya dengan kapasitas pengelolaan. Berikut dinamika dan tantangan yang dirasakan :

a. Hambatan Koordinasi Lintas Sektor

Hambatan utama dalam tata kelola destinasi wisata terlihat bagaimana belum optimalnya koordinasi lintas sektor yang bersifat struktural dan kultural. Program pengembangan wisata di Dermaga Kereng Bangkirai masih cenderung berjalan secara sektoral, yang di mana setiap instansi baik itu pemerintah dan kelompok sadar wisata bekerja berdasarkan mandat masing-masing tanpa ada integrasi manajemen yang menyeluruh. Hal ini dapat dilihat dari perbedaannya perencanaan yang ingin dijalankan sehingga menyebabkan fragmentasi kebijakan, yang di mana intervensi infrastruktur dari masing-masing instansi tidak selaras dengan regulasi lingkungan masyarakat.

Keterbatasan koordinasi yang bersifat mengikat dan berkesinambungan akan menyebabkan komunikasi setiap aktor yang berperan baik pemerintah daerah, sektor swasta, hingga kelompok masyarakat tidak berjalan secara konsisten. Pada teori Collaborative Governance (Ansell & Gash, 2007), menekankan bahwa tanpa mekanisme koordinasi yang terstruktur dan terlembaga suatu asimetri informasi dan ketidakpercayaan antar aktor yang berperan akan menghambat pencapaian tujuan bersama. Di Dermaga Kereng Bangkirai, kurangnya forum koordinasi antar aktor menyebabkan duplikasi program yang memperlambat proses pengambilan keputusan.

Akibatnya, respons terhadap dinamika pasar dan masalah operasional berjalan dengan lambat dan tidak ada akuntabilitas, pada akhirnya mengurangi daya saing maupun daya tarik destinasi.

b. Partisipasi Pemangku Kepentingan

Partisipasi pemangku kepentingan (*stakeholder participation*) adalah keterlibatan individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan terhadap suatu kebijakan, program atau proyek dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi (Lemlem et al., 2025). Partisipasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kepentingan dan pandangan berbagai pihak dipertimbangkan sehingga kebijakan atau program yang dihasilkan lebih efektif dan diterima oleh semua pihak. Pada Kawasan Wisata Dermaga Kereng Bangkirai ini melibatkan pemangku kepentingan dalam setiap aktivitas program yang dilaksanakan, namun masih menunjukkan ketidakseimbangan. Pemerintah memiliki peran dominan dalam tahap perencanaan bahkan sering kali mengambil keputusan top-down. Sementara itu, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan masyarakat setempat lebih aktif pada implementasi operasional dan sangat minim mengambil keputusan secara strategis.

Sebagian masyarakat masih melihat aktivitas wisata sebagai kegiatan tambahan (side income), bukan sebagai sektor ekonomi utama yang harus dikelola secara profesional. Fenomena ini sejalan dengan temuan Bramwell dan Lane (Bramwell & Lane, 2000) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat sering terhambat karena persepsi bahwa pariwisata adalah domain pemerintah atau sektor swasta, bukan hak dan tanggung jawab warga lokal. Begitupun Pokdarwis disana berjalan kurang baik tanpa dukungan kapasitas manajerial yang memadai. Arnstein dalam Ladder of Citizen Participation mengklasifikasikan kondisi ini sebagai tingkat partisipasi yang masih berada pada tahap konsultasi atau informasi belum mencapai tahap kemitraan atau kontrol warga yang ideal untuk keberlanjutan jangka panjang (Nusa & Annisa, 2025).

c. Dukungan Kebijakan

Dukungan kebijakan pemerintah telah terlihat melalui pengembangan infrastruktur dasar dan promosi destinasi. Pemerintah perlu menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan peningkatan kompetensi yang komprehensif. Dengan standar pelayanan wisata, pemasaran digital, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan akan membantu program berjalan dengan baik. Namun, kebijakan yang masih ada cenderung berbasis program jangka pendek dan belum sepenuhnya membangun sistem tata kelola kolaboratif berkelanjutan. Fokus kebijakan seringkali tertuju pada pembangunan fisik sementara aspek kelembagaan dan regulasi operasional masih terabaikan.

Kurangnya regulasi operasional menyebabkan pembagian peran aktor terkadang tidak optimal. Misalnya kurang terjalankannya Peraturan Desa (Perdes) atau Peraturan Daerah (Perda) yang

secara spesifik mengatur bagaimana tata kelola Kawasan Wisata Dermaga Kereng Bangkirai. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum, terutama terkait akses wisata, pembagian keuntungan, hingga standar operasional. Dalam studi kebijakan pariwisata global (Seaman, 2016) menekankan bahwa kebijakan yang baik harus bersifat adaptif dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

Tanpa dasar hukum yang kuat, inisiatif kolaboratif yang dibangun oleh masyarakat akan sulit bertahan menghadapi banyaknya guncangan eksternal, seperti perubahan regulasi nasional maupun konflik kepentingan investasi. Kebijakan Kepariwisata telah memberikan landasan bagi setiap pemberdayaan masyarakat, namun implementasi di tingkat daerah sampai saat ini belum sinkron. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan yang tidak hanya berfokus pada infrastruktur tetapi juga kelembagaan, kepastian hukum, dan mekanisme pengawasan yang partisipatif.

d. Penerapan Sapta Pesona

Sapta Pesona merupakan jabaran konsep sadar wisata yang berkaitan dengan dukungan dan peran masyarakat sebagai tuan rumah dalam upaya menciptakan lingkungan dan suasana kondusif yang mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya pariwisata melalui perwujudan unsur aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan. Sapta pesona pariwisata memiliki korelasi terhadap peningkatan mutu wisata yaitu dalam hal menciptakan daya tarik bagi wisatawan sehingga memberikan sebuah kenangan (*experience*) melalui pelayanan yang aman, tertib, dan ramah serta penyajian objek wisata yang bersih, sejuk, dan indah (Swandewi et al., 2025).

Untuk menciptakan sapta pesona pada masyarakat yang pertama dibenahi adalah paradigma masyarakat yang menganggap sebelah mata destinasi wisata. Maka daripada itu, diperlukan sebuah program pelatihan bagi masyarakat untuk simulasi pengelolaan destinasi dengan metode problem solving learning sehingga memunculkan daya pikir kritis dan sadar akan potensi wisata yang ada sehingga dapat dikembangkan guna menciptakan pariwisata yang berkelanjutan (Rizky et al., 2025).

Sapta Pesona menjadi fondasi utama dalam membangun citra dan kualitas destinasi wisata termasuk di Kawasan Wisata Dermaga Kereng Bangkirai. Pada Collaborative Governance di Kawasan Wisata Dermaga Kereng Bangkirai, penerapan Sapta Pesona bukan sekedar slogan, melainkan indikator keberhasilan tata kelola yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Integrasi prinsip Sapta Pesona dalam operasional di Kawasan Wisata Dermaga Kereng Bangkirai menghadapi berbagai tantangan dalam konsistensi implementasi. Kurangnya rambu petunjuk dan pengawasan keamanan oleh petugas lokal menyebabkan wisatawan merasa kurang nyaman seperti penjagaan parkir yang kurang ketat sehingga ketertiban lalu lintas wisata di area wisata belum terstandarisasi.

Menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, keberhasilan Sapta Pesona bergantung pada partisipasi aktif masyarakat, bukan hanya kewajiban pemerintah sehingga tanpa komunitas prinsip Sapta Pesona sulit tercapai karena pariwisata berbasis komunitas mengandalkan interaksi manusia sebagai produk utamanya. Oleh sebab itu, kerjasama dan keterlibatan komunitas pada prinsip Sapta Pesona sangat perlu terorganisir.

Di Kawasan Wisata Dermaga Kereng Bangkirai, terdapat kesenjangan antara kebijakan nasional dan praktik lokal yang signifikan. Banyak pelaku usaha dan masyarakat belum memahami makna mendalam dari Sapta Pesona karena sering menganggapnya hanya kewajiban kebersihan fisik, padahal mencakup aspek psikologis dan keamanan. Belum ada mekanisme evaluasi yang berkala untuk mengukur tingkat kepuasan wisatawan terhadap penerapan Sapta Pesona serta belum adanya aturan desa yang mengikat masyarakat dalam mematuhi standar Sapta Pesona secara konsisten.

Untuk mengoptimalkannya, diperlukan langkah strategis seperti bentuk kelompok masyarakat berbasis sosialisasi berkelanjutan terutama pada Pokdarwis serta pelaku usaha mengenai standar pelayanan berbasis Sapta Pesona, pemberian insentif bagi warga atau usaha yang konsisten menjaga kebersihan dan keramahan, dan pembentukan tim pengawas gabungan yang melibatkan pemerintah daerah yaitu Dinas Pariwisata beserta desa, Pokdarwis, hingga perwakilan masyarakat atau wisatawan untuk memantau penerapan Sapta Pesona secara efektif.

DISCUSSIONS

Dari hasil temuan yang dilakukan oleh tim penulis di Kawasan Wisata Dermaga Kereng Bangkirai, penulis mendapatkan pendekatan pariwisata berbasis komunitas. Dalam pengelolaannya, terdapat kolaborasi antar sektor pemerintah dan non pemerintah. Beberapa aktor yang terlibat diantaranya pemerintah daerah melalui dinas pariwisata, kelompok sadar wisata (Pokdarwis) masyarakat lokal pemerintahan dan non pemerintah secara bersama untuk mencapai tujuan publik. Kolaborasi ini dibangun melalui dialog kepercayaan komitmen, dan pemahaman bersama antar pemangku kepentingan. Jika dalam konteks pariwisata pendekatan ini perlu dilakukan untuk meningkatkan keterlibatan antar sektor karena pengembangan pariwisata tidak dapat dilakukan jika hanya satu aktor saja yang terlibat.

Dalam pelaksanaannya di Kawasan Wisata Dermaga Kereng Bangkirai dinamika *collaborative governance* dapat dilihat dari hubungan antara pemerintah daerah, kelompok masyarakat, pelaku usaha, serta komunitas lokal yang secara bersama-sama berupaya mengembangkan pariwisata berbasis lingkungan. Selain itu, kawasan wisata ini memiliki karakteristik khusus karena berada di wilayah ekosistem gambut yang berdekatan dengan Taman Nasional Sebangau, salah satu kawasan konservasi penting di Kalimantan.

Kondisi tersebut membuat pengelolaan pariwisata tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek konservasi lingkungan dan keberlanjutan ekosistem. Hasil temuan yang didapat oleh tim penulis, *collaborative governance* di kawasan Kereng Bangkirai menunjukkan adanya interaksi antara beberapa aktor utama seperti pemerintah daerah, Pokdarwis, masyarakat lokal, dan pelaku usaha wisata. Pemerintah daerah melalui dinas terkait berperan sebagai fasilitator yang menyediakan regulasi, infrastruktur dasar, serta promosi destinasi wisata. Meskipun *collaborative governance* memberikan peluang untuk menciptakan tata kelola pariwisata yang lebih inklusif, dalam praktiknya terdapat berbagai tantangan yang mempengaruhi efektivitas kolaborasi. Keterbatasan koordinasi antar lembaga serta perbedaan kepentingan antar aktor yang terlibat dalam pengelolaan destinasi wisata.

Collaborative governance dalam pengembangan pariwisata menunjukkan bahwa keberhasilan kolaborasi sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan antar aktor serta efektivitas komunikasi dalam proses pengambilan keputusan. Kurangnya kepercayaan dan koordinasi antar stakeholder dapat menghambat proses kolaborasi sehingga pengembangan pariwisata tidak berjalan secara optimal.

Selain itu, kapasitas kelembagaan masyarakat juga menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan destinasi wisata berbasis komunitas. Tantangan lainnya yang diperoleh tim peneliti adalah aspek tata kelola pariwisata berkelanjutan menunjukkan bahwa lemahnya kapasitas organisasi masyarakat dapat menyebabkan proses pengelolaan destinasi wisata masih bersifat top-down dan belum sepenuhnya partisipatif. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan masyarakat serta peningkatan kapasitas stakeholder menjadi langkah penting dalam meningkatkan efektivitas *collaborative governance* dalam pengelolaan destinasi wisata.

CONCLUSIONS

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa dinamika *collaborative governance* di Kawasan Wisata Dermaga Kereng Bangkirai telah terbentuk melalui interaksi antara berbagai pemangku kepentingan, meliputi Dinas Pariwisata, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), masyarakat lokal dan sektor swasta. Kolaborasi ini menjadi fondasi penting dalam pengelolaan destinasi berbasis komunitas yang berorientasi pada berkelanjutan ekologis dan sosial. Namun, implementasi *collaborative governance* masih menghadapi tantangan signifikan, terutama terkait koordinasi lintas sektor yang belum optimal, ketidakpastian hukum kelembagaan seperti status Pokdarwis, dukungan kebijakan, partisipasi yang cenderung bersifat operasional, hingga penerapan Sapta Pesona.

Temuan ini mengindikasikan bahwa *principled engagement* dan *shared motivation* dalam kerangka *Collaborative Governance Regimes* (CGR) telah mulai terbangun, *capacity for joint action* masih perlu

diperkuat melalui ketersediaan dan penguatan kelembagaan serta mekanisme komunikasi yang lebih terstruktur. Sehingga tantangan yang dihadapi dapat dijalani dengan manajemen berproses lebih baik dan menciptakan akuntabilitas. Maka dari itu diperlukannya dukungan berkelanjutan pada pengelolaan destinasi melalui implementasi Sapta Pesona, diperlukannya penguatan regulasi operasional, hingga pembentukan forum koordinasi yang inklusif. Dengan demikian, kolaborasi multipihak dapat bertransformasi dari yang sekadar interaksi sektoral menjadi tata kelola yang bersinergis, partisipatif dan mampu menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan demi terciptanya pariwisata berkelanjutan.

Diharapkan bagi pemangku kepentingan untuk bisa memperkuat legitimasi kelembagaan Pokdarwis melalui penerbitan Surat Keputusan resmi serta membangun forum koordinasi lintas sektor guna mengatasi fragmentasi kebijakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam implementasi Sapta Pesona secara berkelanjutan. Peneliti selanjutnya disarankan dapat mengembangkan studi dengan pendekatan metode campuran atau kuantitatif guna mengukur dampak ekonomi dan tingkat kepercayaan secara objektif serta memperluas cakupan lokasi studi ke destinasi berbasis komunitas lainnya untuk menguji generalisasi kerangka *Collaborative Governance Regimes* (CGR) dalam konteks ekosistem yang berbeda.

REFERENCES

- Ali, E. M. T. E., Ishak, M. S. I., Ismail, A. F., Halim, M. S. A., & Baba, Z. S. (2025). The Potential of Waqf in Strengthening Community-Based Tourism in Terengganu, Malaysia. *Global Journal Al-Thaqafah*, 15(1). <https://doi.org/10.7187/GJAT072025-3>
- Ansell, C., & Gash, A. (2007). *Collaborative Governance in Theory and Practice*. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Berhanu Melese, K., Mohammed Ismael, T., & Alemayehu, S. (2026). Sustainable community-based tourism development nexus livelihood improvement in urban areas: Evidence from Addis Ababa, Ethiopia. *Environmental and Sustainability Indicators*, 29. <https://doi.org/10.1016/j.indic.2025.101074>
- Bramwell, B., & Lane, B. (2000). *Tourism Collaboration and Partnerships*.
- Charmaz, K. (2006). *Constructing Grounded Theory: Practical Guide Through Qualitative Analysis*. SAGE Publications, Inc.
- DURRAH, O., EL-MAGHRABY, L., ELBAZ, A. M., HISAM, M. W., & ALKHALAF, T. (2026). HOW CAN COMMUNITY-BASED TOURISM HELP PROMOTE SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE TOURISM SECTOR? *Geojournal of Tourism and Geosites*, 64(1). <https://doi.org/10.30892/gtg.64105-1655>

- Emerson, K., & Gerlak, A. K. (2014). Adaptation in Collaborative Governance Regimes. *Environmental Management*, 54(4). <https://doi.org/10.1007/s00267-014-0334-7>
- Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015a). Evaluating the productivity of collaborative governance regimes: A performance matrix. *Public Performance and Management Review*, 38(4). <https://doi.org/10.1080/15309576.2015.1031016>
- Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015b). *Public Performance & Management Review Evaluating the Productivity of Collaborative Governance Regimes: A Performance Matrix*. (June 2015), 37–41. <https://doi.org/10.1080/15309576.2015.1031016>
- Fikri, Mhd. H., Murhayati, S., & Darmawan, R. (2025). Kebebasan Data dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2).
- Hasanah, D. M., & Surya, B. A. (2025). Validitas Data dalam Penelitian Kualitatif Digital: Penerapan Triangulasi Sumber dan Peer Debriefing. *Jurnal Metodologi Penelitian Sosial Dan Komunikasi*, 8(1).
- Laksmindari, & Priskilla. (2024). Peran Pemerintah Kota Palangka Raya dalam Pengembangan Objek Wisata Sei Batu Kelurahan Sei Gobong Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya *The Role Of The Palangka Raya City Government in The Development Of The Sei Batu Tourism Object , Sei Gobong Village*. 97–102.
- Lemlem, N., Ngugi, Prof. P. K., & Paul, Dr. S. N. (2025). *Project Stakeholders ' Participation and Implementation of Water Projects in Kenya Project Stakeholders ' Participation and Implementation of Water Projects in Kenya*. 10(3), 66–82.
- Marzaniar, P., & Subarsono, A. (2023). Stakeholder Saliency Analysis in the Policy Formulation of Anti-Violence Against Women and Children. *Journal of Contemporary Governance and Public Policy*, 4(October), 149–174. <https://doi.org/https://doi.org/10.46507/jcgpp.v4i2.158>
- Maulana, H. F., Rahim, A., Studi, P., Komunikasi, I., Ilmu, F., Politik, I., & Buton, U. M. (2024). *Pengembangan Pariwisata Berbasis Community Based Tourism pada Desa Wisata Waburi Park Buton Selatan*. 4(1), 545–550.
- Mukarromah, I., Qomariyah, D. N., Hayuningtyas, N., Khodijah, S., & Lindayani, L. R. (2025). Seblang Dance's Cultural Semantics: Conserving the Oseng Tribe to Promote Banyuwangi's Cultural Tourism. *SAWERIGADING*, 31(2). <https://doi.org/10.26499/sawer.v31i2.1614>
- Mulyani, S., Dewi, R., Ahsani, P., & Wijaya, D. N. (2021). *Collaborative Governance on Ecotourism : Towards Sustainable Tourism Development*. 17(148), 319–334. <https://doi.org/10.24258/jba.jba.v17i3.958>
- Nainggolan, H. C., Prihadi, D. J., & Mulyana, H. (2024). *Community- Based Tourism as A Solution To Reduce the Negative Impact of Mass Tourism*. 2(4), 88–93.

- Nguyen, T. Q. H., & Nguyen, Q. V. (2026). Research trends in community-based tourism: A bibliometric analysis. *Global Economics Research*, 2(1).
- Nusa, R. A., & Annisa, F. (2025). *Analisis Konsep Arnstein 's Ladder Of Participation Dalam Mega Proyek Ibu Kota Nusantara*. 3(3), 5048–5057.
- Priatmoko, S., Purwoko, Y., Winarno, S. B., Widayati, E., Panghastuti, T., Wigati, E., Endro, & Isnugroho1. (2025). *POTENSI DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN PARIWISATA Di DUSUN WOTAWATI di DESA WISATA "DEWI PURBO", KABUPATEN GUNUNGKIDUL, YOGYAKARTA*. 2(2), 49–55.
- Rahayu, S., & Saragih, M. G. (2022). *Pengembangan pariwisata berkelanjutan*.
- Rahim, Ir. F. (2012). *Buku Pedoman Kelompok Sadar Wisata*.
- Rahman, F., Kutanegara, P. M., Bachruddin, Z., & Susilastuti, D. H. (2024). *Barriers to Local Community Involvement in Community-Based Tourism Development: Evidence from Area Model of Conservation and Education (AMCE) Oro-Oro Ombo Village Batu City Indonesia*. 4(2), 133–149. <https://doi.org/10.35313/jtospolban.v4i3.130>
- Rizky, F. M., Malihah, E., & Andari, R. (2025). *PENINGKATAN MUTU WISATA BERBASIS SAPTA PESONA MELALUI KONSEP COMMUNITY BASED TOURISM GUNA MENCIPTAKAN KEBERLANJUTAN PARIWISATA*. 7(2), 132–141.
- Sadykov, Z., Petrichsheva, N., Yessilov, A., Temiraliyeva, Z., & Rey, I. (2026). THE ROLE OF COMMUNITY-BASED TOURISM IN ENHANCING SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT IN KAZAKHSTAN. *Bangladesh Journal of Multidisciplinary Scientific Research*, 11(1). <https://doi.org/10.46281/bjmsr.v11i1.2765>
- Salsabila, I., & Puspitasari, A. Y. (2023). *Peran Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) dalam Pengembangan Desa Wisata The Role of Tourism Awareness Group (POKDARWIS) in Tourism Village Development*. 3(2), 241–264.
- Saputra, I. P. D. A. (2024). *Pentingnya Pariwisata Berkelanjutan dalam Menjaga Keseimbangan Lingkungan*. 4(2).
- Sarah J. Tracy. (2013). Qualitative Research Methods: Collecting Evidence, Crafting Analysis, Communicating Impact. In *Handbook of Research Methods in Tourism: Quantitative and Qualitative Approaches*. Wiley-Balckwell. <https://doi.org/10.4337/9781781001295>
- Seaman, B. A. (2016). *Cultural Tourism : Global and Local Perspectives by Greg Richards*. 32(3), 231–236.
- Siok, M. H. U. (2025). *COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA LOHA UNTUK MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) DESA DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT*. 0663(1).

- Suriyankietkaew, S., Krittayaruangroj, K., Thinthan, S., & Lumlongrut, S. (2025). Creative tourism as a driver for sustainable development: A model for advancing SDGs through community-based tourism and environmental stewardship. *Environmental and Sustainability Indicators*, 27. <https://doi.org/10.1016/j.indic.2025.100828>
- Swandewi, P. A., Ayu, I., Hemy, P., Studi, P., Kesejahteraan, P., & Ganesha, U. P. (2025). IDENTIFIKASI PELAKSANAAN SAPTA PESONA PADA DESTINASI WISATA DI DESA WISATA AMBENGAN KECAMATAN SUKASADA KABUPATEN BULELENG. 16, 71–82.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10.TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN (2009).
- Wahyudin, C., Firliandoko, R., Amalia, N., Zulfa, A. A., Studi, P., Publik, A., Djuanda, U., Tol, J., No, C., Barat, J., Cecep, K., & Email, W. (2024). MODEL TATAKELOLA PARIWISATA BERBASIS KOLABORATIF DALAM COLLABORATIVE BASED TOURISM GOVERNANCE MODEL IN SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal sehingga masih kurangnya ketertarikan wisatawan untuk mengunjungi destinasi wisata yang ada di tenjolaya. 10, 147–164.
- Wilhelmina, N., & Mistriani, N. (2025). TRANSFORMASI DIGITAL PARIWISATA: EFEKTIVITAS MEDIA SOSIAL STRATEGI PROMOSI MENARIK GENERASI MILENIAL KE GRAND MAERAKACA SEMARANG. *Kepariwisataan: Jurnal Ilmiah*, 19(1). <https://doi.org/10.47256/kji.v19i1.718>